

# TESIS

## **PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DITINJAU MELALUI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

**ANDREAS VIDI WIJAYA**  
**NPM : 15310023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**T E S I S**

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR1/PNPS  
TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI  
KEADILANJOHN RAWLS**

**Diajukan oleh :**


**ANDREAS VIDI WIJAYA**  
**NPM :15310023**

**TELAH DI UJI**

**Tanggal 28 Juli 2017**


**OLEH:**

**Pembimbing I**



**Dr. Umi Enggarsari,SH.,M .Hum.**


**Pembimbing II**



**Noor Tri Hastuti,SH.,M.Hum.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Ari Purwadi,S.H.,M.Hum.**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**T E S I S**

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR1/PNPS  
TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN  
JOHN RAWLS**




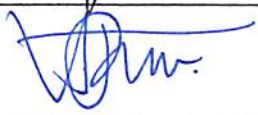
Diajukan oleh :

**ANDREAS VIDI WIJAYA**  
**NPM :15310023**

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI**

Pada Tanggal : 28 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

<b>Nama Penguji</b>		<b>Tanda Tangan</b>
Dr. Joko Nursariono,SH.,M.H.	Ketua	
Dr. Edy Krisharyanto,SH.,M.H	Anggota	
Dr. Umi Enggarsari,SH.,M.Hum.	Anggota	
Noor Tri Hastuti,SH.,M.Hum.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 28 Juli 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



**Dr. Ari Purwadi,S.H.,M.Hum**

## ABSTRAKSI

### PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pancasila adalah dasar nilai kebhinekaragaman bangsa, namun kebhinekaan bangsa akhir-akhir ini mulai mengalami kendala, Penulis mengamati dewasa ini perbedaan yang ada di masyarakat bersifat kultural dieksploitasi ke dalam ruang pergulatan yang bersifat struktural. Konsep hidup dalam perbedaan tanpa pemisah antar satu dengan yang lainnya menghadapi tantangan yang tadinya hidup berdampingan menjadi berhadapan. Semula saling melengkapi, menjadi saling *menegasi* sehingga berdampak pada konflik yang berbahaya terutama dalam hal keyakinan. Memang menjadi sangat sulit dibedah antara kebebasan hidup sebagai warga negara dengan penafsiran masing-masing sudut pandang hak Asasi Manusia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan studi *literature* dan dokumentasi peraturan-peraturan perundang-undangan serta mempelajari teori-teori mau pun asas-asas yang berkaitan dengan hukum dan keadilan John Rawls.

Ada alasan di mana UU No. 1/PNPS/1965 Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia. Negara mempunyai peran mengakui dan jaminan perlindungan yang sama semua penganut agama. Karena PNPS ini lahir dari kondisi Negara pada saat itu diguncang oleh gerakan-gerakan yang anti terhadap agama. Namun seiring perkembangan jaman muncul pasal ini di nilai sebagai pasal "karet" yang bisa menjerat siapa saja yang mempunyai penafsiran berbeda terhadap ajaran asli. Maka dibutuhkan ketajaman dalam penafsiran atas pasal ini, sehingga bisa mewujudkan keadilan dan bukan untuk mematikan keragaman yang ada di Indonesia. Dikatakan melanggar HAM ketika pasal ini ditunggangi oleh politik, untuk menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan politik identitas. Dalam Negara demokrasi sangat kentara ketika menganut konsep suara mayoritas (suara terbanyak) dan minoritas, sehingga kepentingan mayoritas yang lebih diutamakan namun belum jelas letak kebenarannya. Penulis melihat sisi ketidakadilan terjadi melanggar hak-hak individu dalam hidup bernegara di Indonesia, maka konsep ini yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini, melalui konsep keadilan John Rawls.

Kata Kunci : Pancasila, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan agama, Mayoritas-Minoritas, Konsep Keadilan John Rawl



## ABSTRACT

### *Stipulation of The President Republic Indonesia Number 1/ PNPS - 1965 on of Prevention of misuse and / or Blasphemy Religious Domestics Reviewed from John Rawls Theory of Justice*

*The State of Indonesia is a State of Law. Pancasila is the basic value of diversity of nations, but the diversity of the nation lately began to experience obstacles, the author observes that today the differences exist culturally exploited in societies into the structural sphere of struggle. The concept of living in disagreement with each other faces the challenges that once lived side-by-side. Initially complementary, being mutually negated so that the impact on the conflict is dangerous, especially in terms of belief. It would be very difficult to dissect the freedom of life as a citizen with the interpretation of each human rights perspective.*

*The type of research used by the author is normative law, because the research conducted is literature study and documentation of laws and regulations as well as legislation and policy regulations. Then this concept will be studied further in this paper, through John Rawls concept of justice.*

*There is a reason why Law no. 1 / PNPS / 1965 Prevention of Blasphemy Religion does not destroy the existing religious pluralism and grow in Indonesia. The state has a role to recognize and guarantee the same protection of all religious followers. Because this PNPS was born from the condition of the State at that time was shaken by movements that are against religion. However, as the era emerges this article is a "rubber" article that can ensnare anyone who has a different interpretation of the original doctrine. So it takes carefulness in the interpretation of this article, in order to realize justice and not to kill the diversity that exists in Indonesia. It is said to violate human rights when this article is ridden by politics, to bring down political opponents by using identity politics. In a democratic country it will be very obvious when embracing the concept of majority (majority vote) and minority, so that the interests of the majority are preferred but not yet clear the truth. The author sees the side of injustice breaking the rights of the individual in the life of the state in Indonesia, then this concept will be studied further in this paper, through John Rawls concept of justice.*

*Key: Pancasila, Law no. 1 / PNPS / 1965 Blasphemy, Majority-Minorities, Justice Concept John Rawls*

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andreas Vidi Wijaya  
NPM :15310023  
Alamat : Ds Slorok RT/RW : 1/1 Kec Garum, Kab Blitar  
No telp :

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan dari karya orang lain.

Apa bila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 8 Agustus 2017



Yang menyatakan

Andreas Vidi Wijaya  
NPM :15310023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis **"PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN / ATAU PENODAAN AGAMA DITINJUAN MELALUI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS"** Rasa Hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril Maupun materill.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Sri Harmadji., dr., SP.THT-KL(K), selalu Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bambang Yunarko, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr.Ari Purwadi,S.H.,M Hum. Selaku ketua program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Umi Enggarsasi, SH., M Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Noor Tri Hastuti ,SH.,M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Kepada Bpk Yakobus Suwardi dan Maria Tridewi, serta adik-adik saya Yohanes Hendrik Wijaya, Rendi, Senda Anugrahan, Agil Wijaya, dan Aletheia telah memberi dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini
7. Kepada Dosen istimewa dan sekaligus pembimbing Skripsi waktu belajar S1 Filsafat Widya Mandala sehingga menginspirasi Penulis untuk giat belajar RD. Xaverius Chandra Hasiholan, Lic. Theol.
8. Handayani, SE., Kang Aris Very Sutantyo, Robertus Kenan, S.Fil. Jemblink, Julius Susanto, RD. Karel Nuki Prayogi, RD Widyawan Louis, Lic. Phil., Dr Reza A.A. Wattimena, Dr. Ramon Antonio Eguia Nadres, Bunda Heliana Hwandoyo, Keluarga Ibu Handayani dan Pak Hendri, Badrus Soleh, Cak Guntoro, Mbak Wulan, dr Nario Gunawan, Keluarga Ang Indah Muliani, Ms Yeane, Diana Kholidah, Gaguk, Lidya Sherly, Erna Widyawati, Tika, Pak Lurah Sujai, Yenika Ryanti, *Alm* Dudud. Teman-teman kerja di AELIcourse, dan Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Wijaya Kusuma yang telah memberikan semangat pada penulis.

Akhirnya, penulis juga menyadari Tesis ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran yang berguna untuk mendalami tema Tesis ini, dan juga untuk perkembangan Teori Hukum Di Indonesia.

Surabaya, 16 Agustus 2017

Andreas Vidi Wijaya



## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi .....	i
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Teoritis .....	14
1. Hierarki Peraturan Perundang-undang di Indonesia,HAM dan Negara Hukum .....	14
2. Aliran Hukum .....	17
F. Metode Penelitian .....	32
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	34
<b>BAB II    UNDANG-UNDANG PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK            INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG            PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN /ATAU PENODAAN            AGAMA DALAM PANDANGAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS</b>	
A. Latar Belakang Pembentukan UU No 1/PNPS/1965 .....	36
B. Aliran Hukum Keadilan menurut Aristoteles, Hans Kelsen – dan John Rawls.....	42
C. Kedudukan hukum PNPS dalam Hierarki Hukum Nasional (UU No 12- tahun 2011 .....	49
D. Aspek Yuridis Formiil UU No. 1/ PNPS/1965 .....	50

**BAB III UNDANG-UNDANG PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN /ATAU PENODAAN  
AGAMA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI  
MANUSIA**

<b>A. Agama dan Negara Demokrasi dalam Konsep Negara - Hukum Indonesia .....</b>	<b>61</b>
<b>B. Hasil Uji Materi Undang-Undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama jo UU No. 5 Tahun 1969.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Analisis Putusan MK Atas Uji Materi UU No. 1/PNPS/ Th. 1965 .....</b>	<b>71</b>
<b>D. Posisi Negara Demokratis.....</b>	<b>73</b>
<b>E. Refleksi analisis atas Undang-Undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama dari Sudut Pandang Keadilan John Rawls.....</b>	<b>78</b>
<b>F. Kritik atas PNPS 1965 berdasarkan hak asasi manusia di Indonesia. ....</b>	<b>87</b>

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>99</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>100</b>
<b>Daftar Bacaan</b>	